

Menyongsong Hari Esok
dengan Optimisme dan Integritas

Laporan Kinerja Kementerian Keuangan



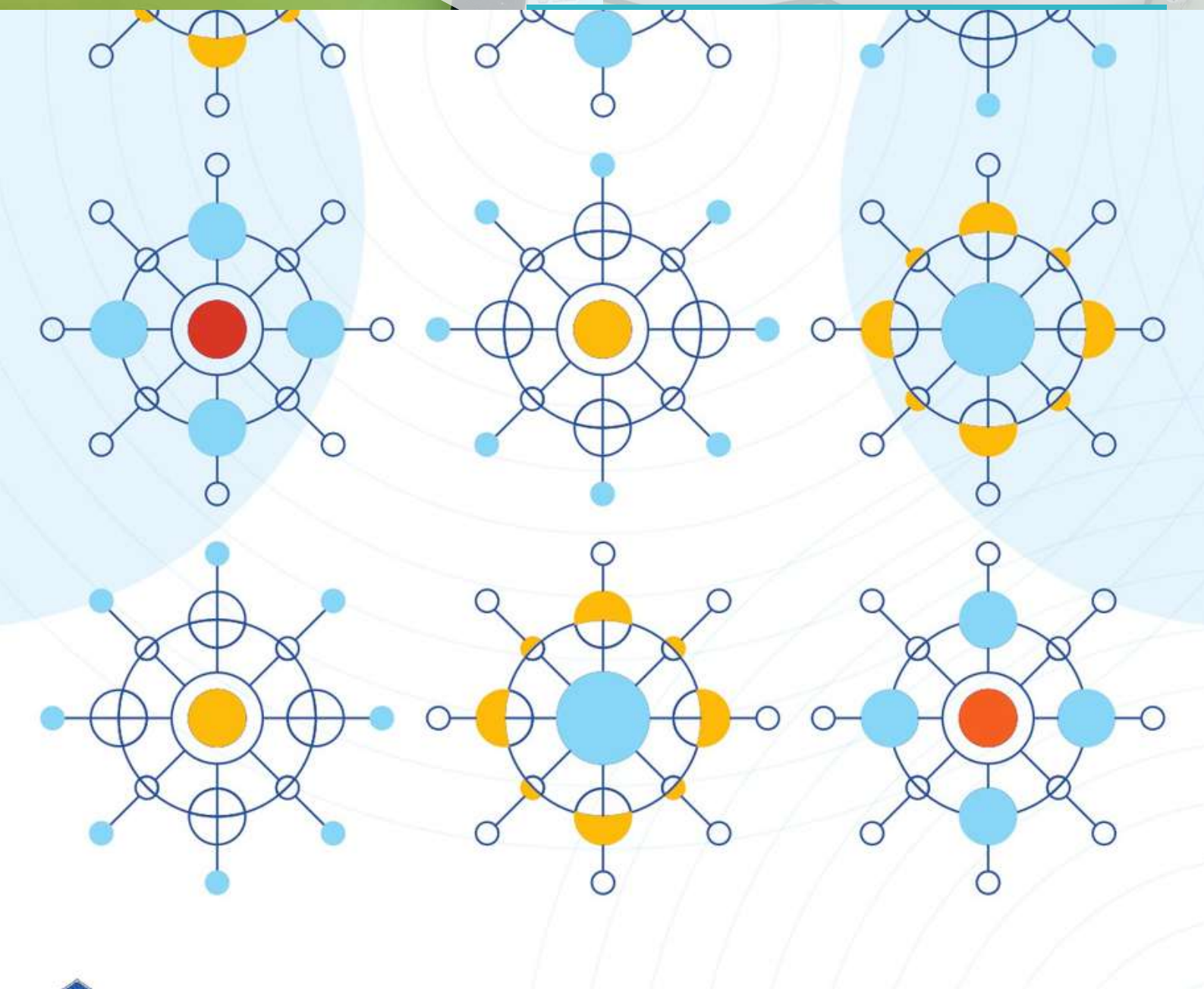
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



TAHUN 2023



LAPORAN KINERJA KPKNL LAHAT



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

ii

iv

vi

BAB 1 – PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

14

b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

c. Wilayah Kerja KPKNL Lahat

20

d. Mandat yang Diberikan kepada KPKNL Lahat

21

e. Permasalahan Utama

22

f. Sistematika Laporan

23

BAB 2 – PERENCANAAN KINERJA

a. Peran Strategis

26

b. Rencana Strategis

27

c. Peta Strategi Tahun 2023

28

d. Kontrak Kinerja

29

BAB 3 - AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja KPKNL Lahat	34
1. Target dan Realisasi Tahun 2023	34
2. Pencapaian KPKNL Lahat	37
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja	42
b. Realisasi Anggaran	60
c. Data dan Narasi Kinerja Lainnya	61

BAB 4 - PENUTUP

a. Simpulan	64
b. Saran	66

LAMPIRAN

1. Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Lahat Tahun 2023	70
2. Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Lahat Tahun 2023	78

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pembaca yang terhormat,

Adalah menjadi kewajiban kami selaku instansi pemerintah untuk memberikan layanan profesional dan terbaik sesuai tugas kami di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Sudah tentu, seluruh capaian kami dalam melaksanakan tugas harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya kepada para stakeholder.

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2023. LAKIN KPKNL Lahat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Balance Score Card (BSC) sebagai instrumen untuk mengukur kinerja KPKNL Lahat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2023. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lahat berdasarkan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 115,72% dari nilai maksimal 100%.

LAKIN KPKNL Lahat Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Lahat serta upaya meningkatkan kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang untuk menjawab semakin tingginya harapan masyarakat atas kinerja dan pelayanan birokrasi.

Akhir kata, kepada seluruh pegawai KPKNL Lahat kami berikan apresiasi yang tinggi atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi dan semua upaya agar mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas. Tak lupa pula kami membuka diri atas segala saran dan kritik dari seluruh stakeholder sebagai salah satu upaya kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Lahat, 31 Januari 2024

Kepala Kantor

MASDJAYA



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang disampaikan melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Lahat Tahun 2023. LAKIN Tahun 2023 tersebut digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN selaku instansi vertikal yang membawahi KPKNL Lahat yaitu: **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.



Laporan Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2022 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPKNL Lahat dalam meningkatkan kinerja. LAKIN KPKNL Lahat Tahun 2023 merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis DJKN 2020-2024.

LAKIN memiliki fungsi sebagai alat kontrol, alat pengukuran kinerja dan alat pemacu dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, sebagai organisasi yang terus berkembang, KPKNL Lahat sebagai ujung tombak kantor pelayanan di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perlu memiliki kontrol yang baik dalam memantau kinerja yang menjadi tujuan organisasi.

Berdasarkan strategi-strategi yang termaktub dalam Rencana Strategis, KPKNL Lahat menyusun Kontrak Kinerja yang di dalamnya memuat Indikator Utama (IKU). IKU inilah yang kemudian menjadi alat kontrol kuantitatif dalam pengukuran berhasil atau tidaknya KPKNL Lahat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sepanjang tahun 2023, KPKNL Lahat telah menorehkan pencapaian yang dapat diukur secara kuantitatif melalui penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dihasilkan berdasarkan capaian IKU, yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar 120%.
2. Persentase Produktivitas Lelang sebesar 120%.
3. Persentase Realisasi Pokok Lelang sebesar 120%.
4. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara sebesar 120%.
5. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL sebesar 101,09%.
6. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 120%.
7. Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikatkan sebesar 120%.
8. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN sebesar 120%.
9. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) sebesar 120%.
10. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian sebesar 120%.
11. Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction sebesar 108,70%.
12. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN sebesar 120%.
13. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi sebesar 101,86%.
14. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara sebesar 117,65%.
15. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sebesar 120%.
16. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kinerja ZI Menuju WBK/WBBM sebesar 120%.
17. Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja sebesar 120%.
18. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Adminisrator sebesar 105,66%.
19. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 103,76%.
20. Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan sebesar 120%.

**NKOKPKNL
LAHAT T.A. 2023
MENCAPAI
115,76%,
ADAPUN
SEBAGAI
PERBANDINGAN
NKOTA. 2022
115,72% DAN T.A.
2021 (111,52%)**

Berdasarkan pencapaian tersebut di atas hasil penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lahat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 115,76 % dari nilai maksimal 100%.

Jika dibandingkan dengan NKO Tahun 2022 dan 2021 yaitu masing-masing sebesar 115,72% dan 111,52%, KPKNL Lahat secara konsisten mempertahankan kinerjanya setiap tahun.

Ke depan, KPKNL Lahat akan bekerja lebih inovatif guna meningkatkan capaian-capaian strategis sehingga di masa yang akan datang diharapkan tidak saja optimal dan akuntabel (prinsip *Good Governance*) tetapi juga aplikatif dan inovatif.



KPKNL
LAHAT *sewelo*



MASDJAYA

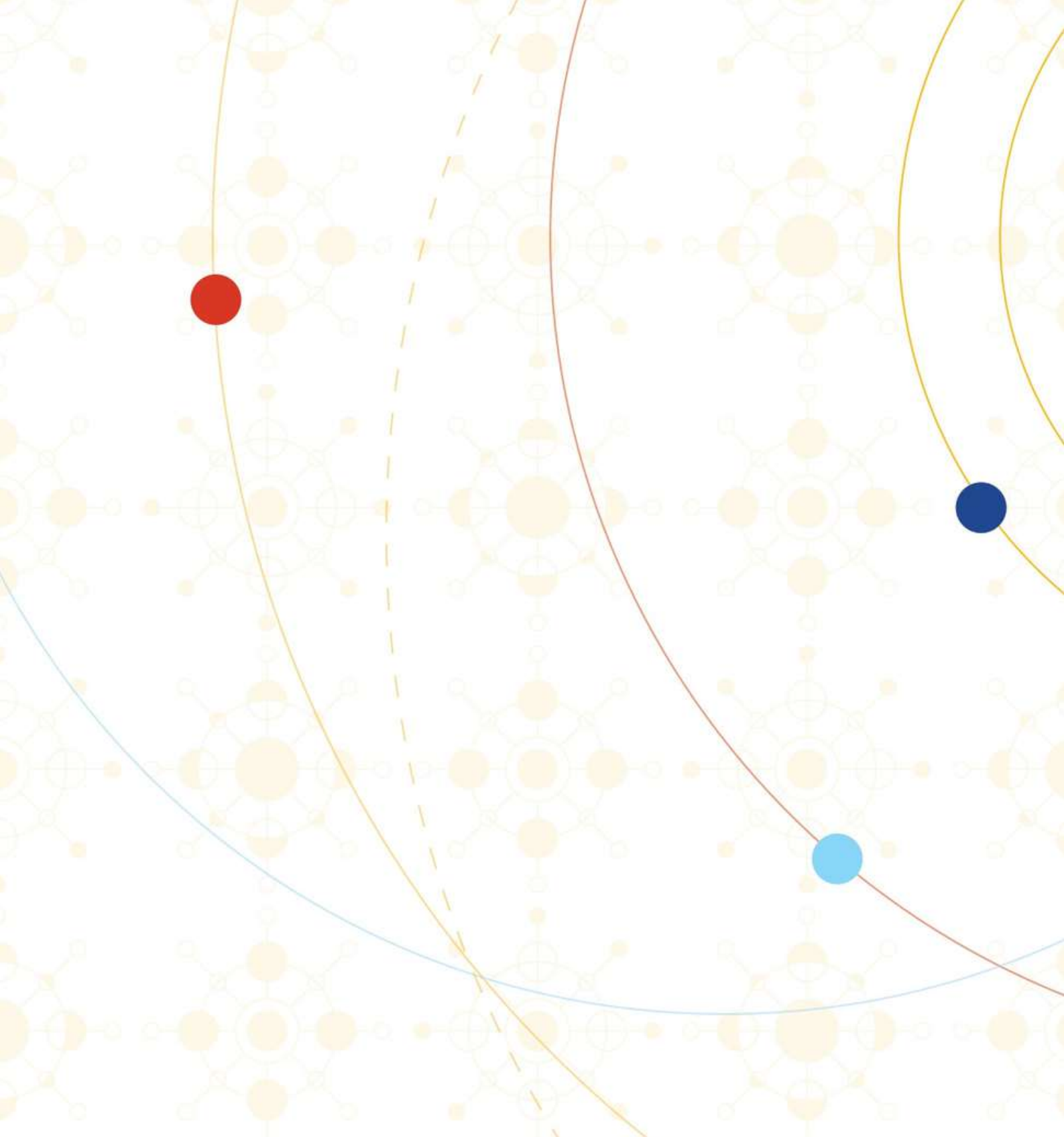
Kepala KPKNL Lahat





PENDAHULUAN





BAB I



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah diubah menjadi Laporan Kinerja (LAKIN).

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

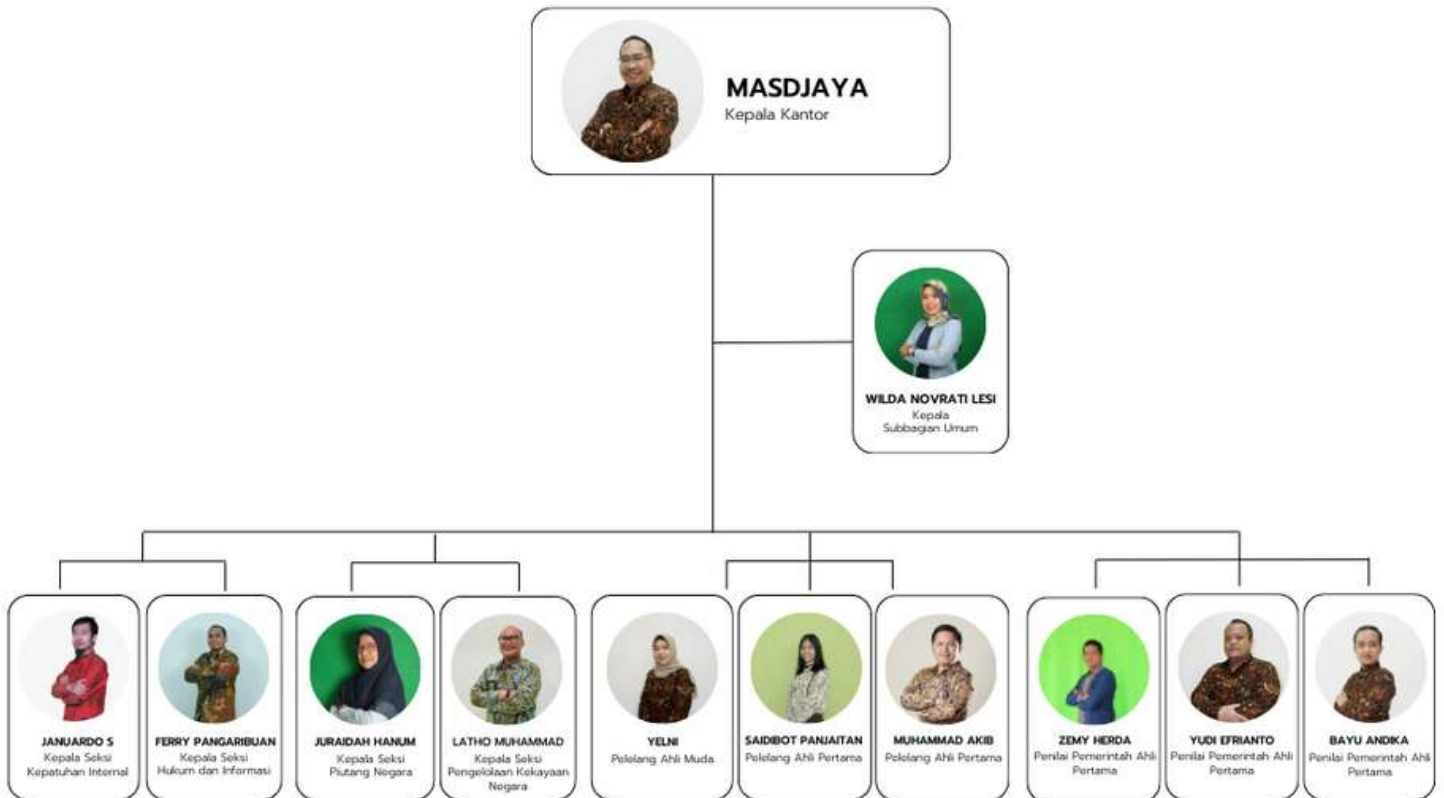
Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada Tahun 2023, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 yang berisi rincian target dan kegiatan serta realisasi yang telah dicapai KPKNL Lahat dari bulan Januari hingga Desember Tahun 2023.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, yang mempunyai kewenangan melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang di wilayah kerja KPKNL Lahat. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Struktur organisasi KPKNL Lahat terdiri dari 1 (satu) jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor) dan 5 (lima) eselon IV.a (Kepala Seksi/Kasubbag Umum) dan 4 (empat) pejabat fungsional.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI



VISI

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada Kepala KPKNL Lahat, seluruh pegawai KPKNL Lahat telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN yaitu:

"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Visi dimaksud menjadi semangat sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Lahat dalam melaksanakan tugas. visi yang ditetapkan dapat diuraikan ke dalam frasa per frasa.

Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel.

Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan.

Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.



Adapun Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Kontribusi** berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;

b. **Instrumental** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;

c. **Otoritatif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset dan di level nasional dan internasional.

d. **Berkelanjutan** diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;

e. **Adaptif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya.

MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KPKNL Lahat menetapkan Misi yang selaras dengan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan mendukung Misi Kementerian Keuangan Nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

TUJUAN

Tujuan merupakan bagian dari misi yang berupa penjabaran misi organisasi dan merupakan suatu hal yang ingin dicapai atau diperoleh dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun ke depan. Oleh karena itu, tujuan KPKNL Lahat memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan KPKNL Lahat adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif dan efisien.

SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dan tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, semesteran dan tahunan. Sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Lahat dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

A. Pengelolaan Kekayaan Negara

- Terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara;
- Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran;
- Terselenggaranya informasi nilai terkini dan nilai potensial kekayaan negara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Piutang Negara

- Terwujudnya pengurusan piutang negara secara sehat dan bersih;
- Tercapainya target piutang negara yang dapat diselesaikan (PNDS);
- Terwujudnya pengelolaan dokumen asli barang jaminan.

C. Pelayanan Lelang

- Terselenggaranya pelayanan lelang bersih, transparan dan akuntabel;
- Tercapainya target hasil lelang baik dari pokok lelang maupun bea lelang.

D. Pelayanan Penilaian

- Penertiban BMN satker K/L tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2019 yang optimal;
- Administrasi Seksi Pelayanan Penilaian yang tertib;
- SDM Penilai yang handal;
- Pelayanan penilaian dalam rangka utilisasi BMN yang optimal;
- Pelayanan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara yang optimal;
- Tersedianya harga pasar yang wajar dalam rangka penyusunan DKPB.

E. Hukum dan Informasi

- Tercapainya peningkatan penatausahaan BKPN dan penyajian informasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Tercapainya optimalisasi penanganan perkara.

F. Kepatuhan Internal

- Pelaksanaan SOP Unggul tepat waktu;
- Penyusunan kontrak kinerja yang tepat waktu dan mencerminkan capaian kinerja masing-masing pegawai dan organisasi;
- Mendefinisikan risiko yang mungkin terjadi beserta langkah-langkah pencegahan dan penanganan masalah;
- Memastikan kode etik dan peraturan disiplin pegawai yang berlaku dijalankan oleh seluruh pegawai;
- Memastikan hasil pemeriksaan aparat fungsional ditindaklanjuti;
- Laporan hasil pelaksanaan SOP Layanan Unggulan yang andal dan akurat



G. Umum

- Terlaksananya pemberian dukungan teknis dan administrasi baik di Kantpr Wilayah maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
- Pelaksanaan DIPA yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional kantor.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Lahat menyelenggarakan fungsi di antaranya sebagai berikut:

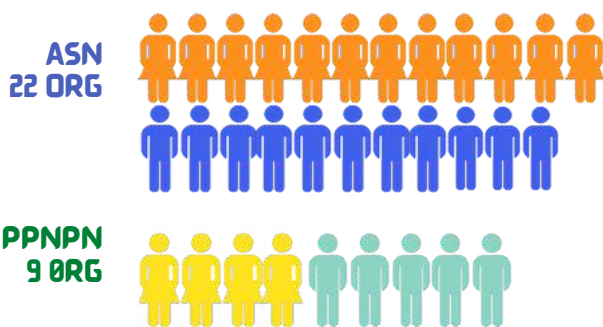
- Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- Pelaksanaan pelayanan lelang;
- Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.



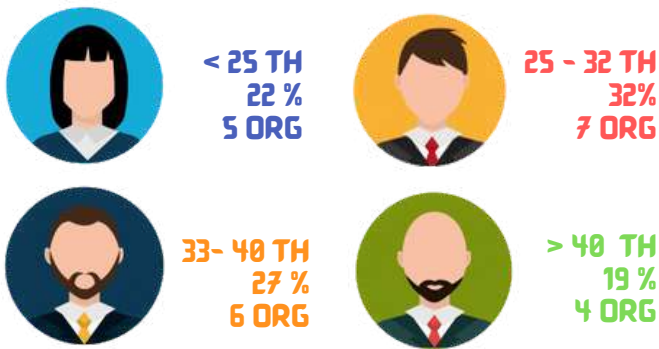
KOMPOSISI PEGAWAI

Untuk menjalankan semua tugasnya, KPKNL Lahat memiliki 22 (dua puluh dua) Pegawai ASN serta didukung oleh 9 (sembilan) Pegawai PPNPN (honorer). Adapun komposisi pegawai ASN pada KPKNL Lahat dapat dipertakan berdasarkan golongan, pendidikan, usia dan kelompok fungsional.

KOMPOSISI PEGAWAI ASN - PPNPN



KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA



KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



KOMPOSISI PEGAWAI

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



KOMPOSISI PEGAWAI KELOMPOK FUNGSIONAL KHUSUS



C. WILAYAH KERJA KPKNL LAHAT

KPKNL Lahat merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki wilayah kerja yang luas meliputi 8 (delapan) kota dan/atau kabupaten. Adapun kota dan kabupaten yang termasuk wilayah kerja KPKNL Lahat adalah sebagai berikut:

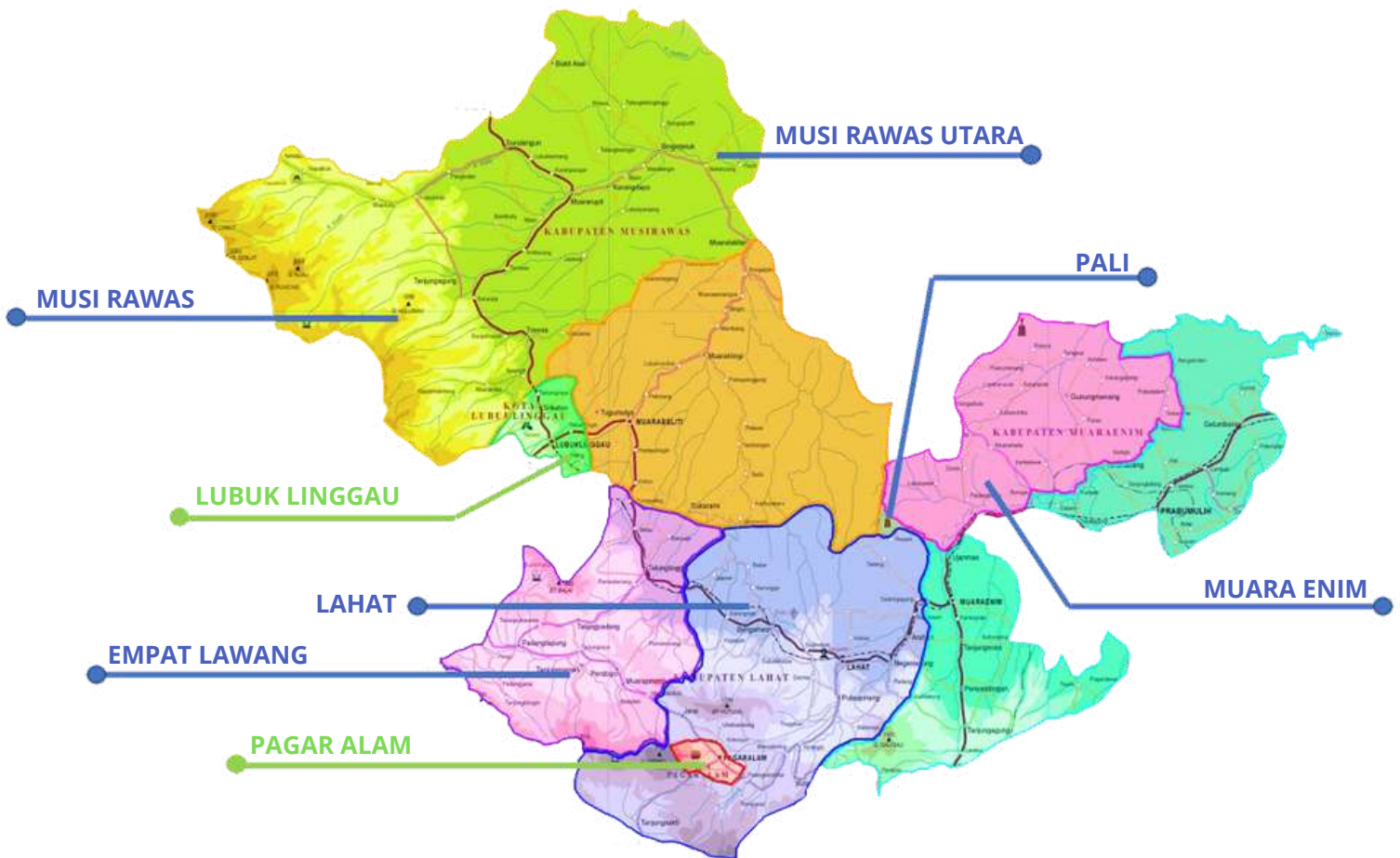


2 KOTA

LUBUK LINGGAU
PAGAR ALAM

6 KABUPATEN

LAHAT
MUARA ENIM
MUSI RAWAS
MUSI RAWAS UTARA
EMPAT LAWANG
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)



D. MANDAT YANG DIBERIKAN KEPADA KPKNL LAHAT

KPKNL Lahat sebagai instansi vertikal DJKN yang diberi mandat untuk mengelola barang telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merapikan manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara serta utilisasi aset negara yang optimal. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL Lahat dikelompokkan dalam 2 (dua) tema pokok, yaitu:

- Tema **Kekayaan Negara** dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;
- Tema **Pendapatan Negara** dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan ekonomi dan keadilan masyarakat.

STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat strategi-strategi yang harus ditempuh, yaitu:

- Membuat usulan atas peraturan-perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, lelang dengan akurat dan akuntabel;
- Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum;
- Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Pengelolaan Anggaran.



E. PERMASALAHAN UTAMA

Transformasi Kelembagaan (TK) Kementerian Keuangan merupakan salah satu program lanjutan dari program reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak tahun 2007 silam. TK Kementerian Keuangan bertujuan menjadikan Kementerian Keuangan sebagai organisasi yang bertaraf internasional yang memegang peranan penting dalam program pembangunan bangsa. Kementerian Keuangan sebagai institusi penting di negara ini memiliki peran-peran strategis yang berkaitan dengan perekonomian bangsa tentunya memerlukan perbaikan di semua instansi.

TK adalah wujud dari perubahan organisasi, model bisnis, sumber daya manusia, dan proses bisnis saat ini ke dalam bentuk yang berbeda yang mampu merespon perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan fungsi DJKN dari *asset manager* tentunya berdampak pada perluasan cakupan pengelolaan kekayaan negara yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar. KPKNL Lahat sebagai institusi di bawah lingkungan DJKN pun memiliki tanggung jawab yang besar dalam tugas *special mission* untuk mengurus Piutang Negara, Penilaian dan Lelang. Hal tersebut membuat cakupan tugas KPKNL Lahat menjadi semakin berkembang di masa mendatang.

KPKNL Lahat sebagai satu institusi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang baik sehingga hal ini mengharuskan KPKNL Lahat untuk terus mendukung dan melayani *stakeholder* lebih inovatif dan efisien.



Laporan Kinerja KPKNL Lahat tahun 2023 terdiri dari:

1. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara umum KPKNL Lahat, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issues*) KPKNL Lahat.

2. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun anggaran 2023.

3. Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan hasil capaian kinerja, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan hasil capaian kinerja secara keseluruhan dengan beberapa tahun sebelumnya, pencapaian tahun ini dengan Rencana Strategis KPKNL Lahat 2019-2024 atau target jangka menengah, evaluasi dan analisa keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja termasuk program atau kegiatan penunjang atau tambahan. Disajikan pula realisasi anggaran untuk mencapai target sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Lahat.

4. Penutup

Bagian penutup menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Lahat, kendala dan/atau hambatan yang dihadapi serta saran dan masukan yang dapat dilakukan oleh KPKNL Lahat di masa mendatang agar dapat terus meningkatkan kinerja.

5. Lampiran

Lampiran menyajikan dokumen Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three* dan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lahat tahun 2023 serta dokumen/hal lain yang dianggap perlu.





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



B. RENCANA STRATEGIS

Pada tahun 2020, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-2915/KN.1/2020 Hal Penyampaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 Tanggal 09 September 2020 disampaikan bahwa para Kantor Wilayah DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), termasuk KPKNL Lahat untuk dapat mendukung mewujudkan Visi DJKN, Visi Kementerian Keuangan serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dengan berpartisipasi aktif mendukung tercapainya Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

TUJUAN

Sejalan dengan Rencana Strategis DJKN dan misi yang diemban, KPKNL Lahat mempunyai tujuan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara;
2. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;
3. Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti;
4. Peningkatan pelayanan penilaian;
5. Optimalisasi pengurusan Piutang Negara;
6. Peningkatan pelayanan lelang;
7. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.



A. PERAN STRATEGIS

KPKNL Lahat memiliki peran strategis organisasi dalam hal sebagai berikut:

MANAJEMEN ASET NEGARA

KPKNL Lahat berperan mengoptimalkan pengelolaan aset negara/BMN, Optimalisasi tersebut dilakukan dengan upaya-upaya antara lain utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara sampai dengan tahap *asset disposal* serta didukung dengan penilaian untuk informasi nilai aset yang wajar sesuai dengan penggunaan tertinggi dan terbaik.

Selain itu KPKNL Lahat memiliki peran strategis dalam mendorong satuan kerja untuk mengamankan aset melalui program sertifikasi tanah BMN.

PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

KPKNL Lahat bereperan dalam pengurusan Piutang Negara/daerah yang dilakukan melalui berbagai proses/tahapan penyelesaian Piutang Negara. Sejalan dengan kebijakan pengembalian Piutang Negara eks BUMN, KPKNL Lahat lebih fokus dalam menggali peluang penyelesaian Piutang Negara baik Pusat maupun daerah.

PELAYANAN LELANG

KPKNL Lahat berperan dalam pelayanan lelang baik lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Dengan keuntungan yang ditawarkan yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Diharapkan KPKNL dapat ikut berperan mendukung penyelesaian kredit macet melalui *disposal asset*.

Seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi informasi maka metode penjualan barang melalui lelang juga turut berkembang, salah satunya implementasi penjualan lelang melalui internet (*e-auction*).

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

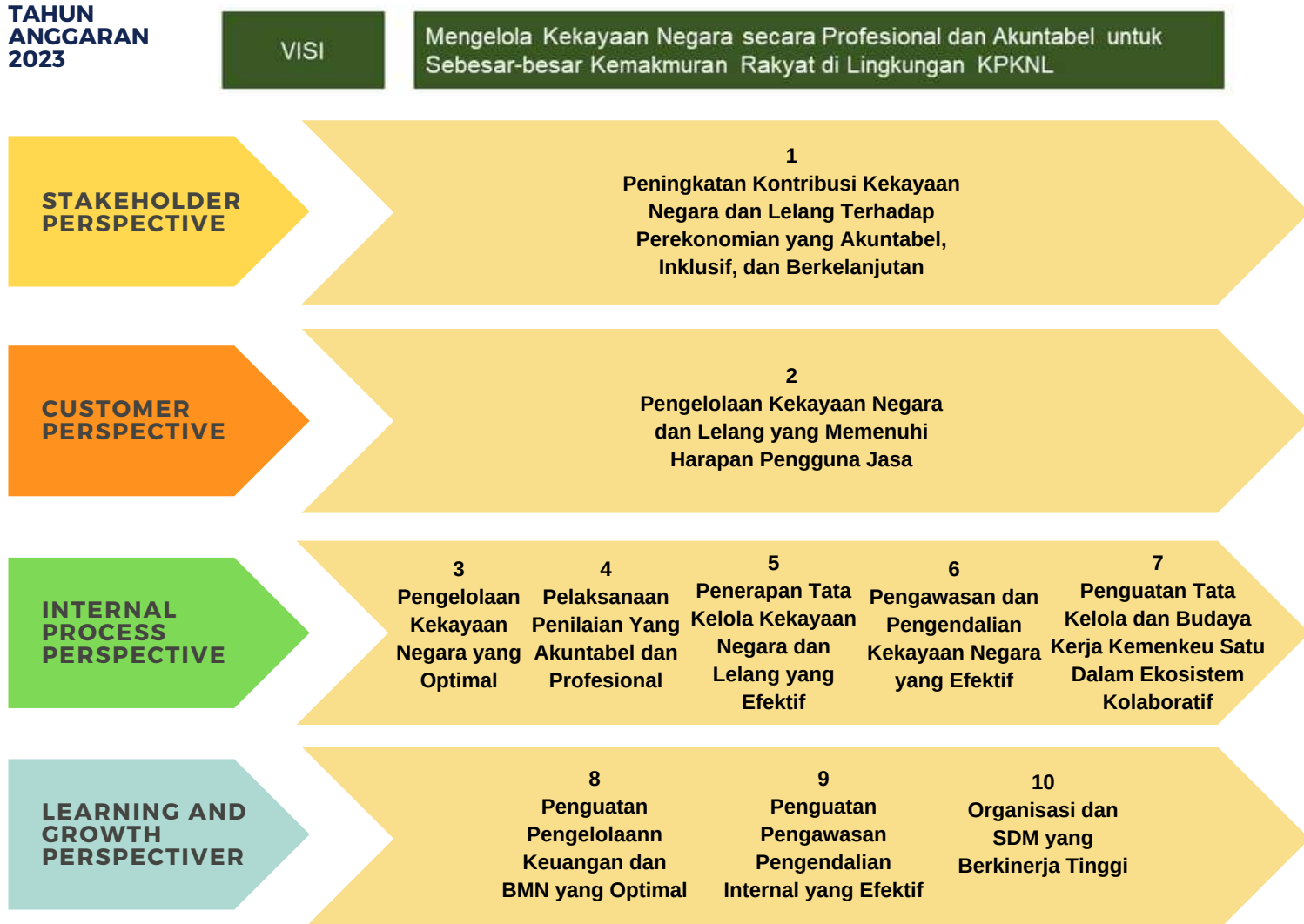
KPKNL Lahat memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam memberikan pelayanan pengurusan Piutang Negara, KPKNL Lahat memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi (BIAD) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Lahat memperoleh hasil bea lelang termasuk bea lelang yang berasal dari lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas, KPKNL Lahat menetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal
4. Pelaksanaan Penilaian Yang Akuntabel dan Profesional
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif
6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif
7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif
8. Penguatan Pengelolaann Keuangan dan BMN yang Optimal
9. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif
10. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

C. PETA STRATEGI TAHUN ANGGARAN 2023



D. KONTRAK KINERJA

Perjanjian/kontrak kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Bersamaan dengan telah ditetapkannya Peta Strategi, KPKNL Lahat memiliki perjanjian kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor [9/KN.16/2022](#) dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
		1a-CP	Indeks Integritas	88,67
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%
		3b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		3c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
4	Pelaksanaan Penilaian Yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%
		5b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	86%

7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
8	Penguatan Pengelolaann Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
		8b-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadilan	100%
		8c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	9a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif	60
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	10a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
		10b-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80

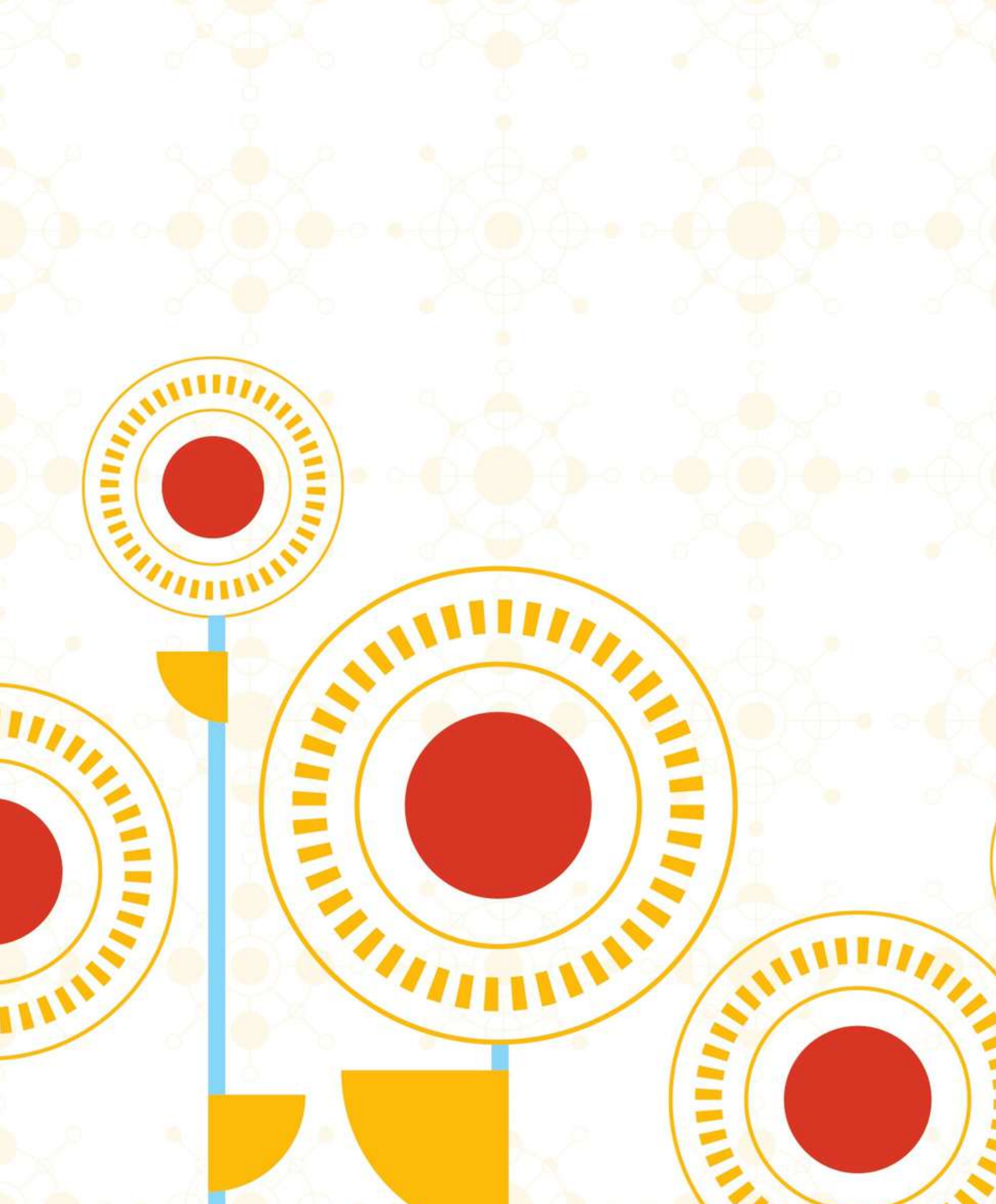
Berdasarkan *Strategy Map Kemenkeu-Three* KPKNL Tahun 2023, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dengan 20 (dua puluh) Indikator Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
2. Persentase Produktivitas Lelang
3. Indeks Integritas
4. Persentase Realisasi Pokok Lelang
5. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
6. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
7. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan
8. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN
9. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
10. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien
11. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction
12. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
13. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara
14. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)
15. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
16. Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadilan
17. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN
18. Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif
19. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
20. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko



AKUNTABILITAS KINERJA





BAB 3



Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai perbandingan antara target dan capaian kinerja KPKNL Lahat tahun 2023 yang dilengkapi dengan capaian kinerja tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019 sebagai referensi capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Bab ini juga akan dijelaskan mengenai hambatan dan evaluasi secara menyeluruh agar dapat menjadi masukan pada tahun berikutnya. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada tahun 2023.

Capaian kinerja organisasi diukur dengan membandingkan data antara target dan realisasi, yang disajikan dalam bentuk persentase. Capaian ini dapat menunjukkan seberapa jauh proses atau kemajuan yang telah didapat dalam periode waktu tertentu.

A. CAPAIAN KINERJA KPKNL LAHAT

Secara ringkas target dan realisasi capaian keluaran (*output*) KPKNL Lahat pada tahun 2023 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja berikut:

1. TARGET DAN PENCAPAIAN KPKNL LAHAT TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	%
Stakeholder Perspective					
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang			130,32%
		a. PNBP Pengelolaan BMN	Rp2.920.400.000	Rp3.056.485.438	
		b. PNBP Piutang Negara	Rp300.000	Rp555,512	
		c. PNBP Lelang	Rp1.500.000.000	Rp2.704.231.298	
		Persentase Produktivitas Lelang			45,01%
		Jumlah Lot lelang Laku Secara keseluruhan		344	
		Jumlah Lot lelang TAP Secara keseluruhan		366	
		Jumlah Lot lelang Wanprestasi Secara Keseluruhan		19	
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2023)	Rp156.000.000	Rp172.000.000	110,26%



Customer Perspective

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang			180,28%
		Pokok Lelang Kelas I	Rp25.500.000.000	Rp57.050.057.766	
		Pokok Lelang Pegadaian	Rp10.000.000.000	Rp20.098.115.600	
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2023)	Rp156.000.000	Rp172.000.000	110,26%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		90,52	90,52%

Internal Process Perspective

4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK			86,19%
		a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2023)		87,83%	
		b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2022		81,26%	
		Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	48	74	154,17%
		Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	3	5	166,67%
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)			123,01%
		1.Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN	74	90	
		2.Target/Realisasi Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi	7	9	
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0%	0%
6	Pelaksanaan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction			100%
		Jumlah Realisasi Frekuensi e-Auction		389	
		Jumlah Realisasi Frekuensi e-Conventional Auction		-	
		Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang		389	100%
7	Edukasi yang Efektif	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	90,50	92,18	92,18





8	Pengawasan Pengendalian yang Efektif	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara		95%
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode Semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L		18
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L		17
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022		20
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023		17

Learning & Growth Perspective					
9	SDM yang Kompeten	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80	91,19	91,19
11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	93,29%	93,29%
		Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	267,00%	267,00%



Sebagai perbandingan, agar dapat mengukur performa kinerja KPKNL Lahat, kami sajikan capaian KPKNL Lahat pada tahun 2022, 2021, 2020, 2019. Rincian indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi target pada tahun sebelumnya tentu tidak sama persis dengan IKU di tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh tantangan global dan evaluasi secara menyeluruh, sehingga dilakukan perbaikan-perbaikan melalui rencana strategis untuk mencapai kesempurnaan pencapaian visi dan misi DJKN khususnya KPKNL Lahat. Adapun target dan capaian kinerja KPKNL Lahat pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

2. PENCAPAIAN KPKNL LAHAT TAHUN SEBELUMNYA

Target dan Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	%
Stakeholder Perspective					
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang			120,86%
		a. PNBP Pengelolaan BMN	Rp2.142.000.000	Rp2.696.279.981	
		b. PNBP Piutang Negara	Rp564.000	Rp829.409	
		c. PNBP Lelang	Rp1.300.000.000	Rp1.463.779.683	
		Persentase Produktivitas Lelang			65,38%
		Jumlah Lot lelang Laku Secara keseluruhan		414	
		Jumlah Lot lelang TAP Secara keseluruhan		233	
		Jumlah Lot lelang Wanprestasi Secara Keseluruhan		26	
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2023)	Rp160.650.135	Rp211.704.729	131,78%
Customer Perspective					
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang			154,66%
		Pokok Lelang Kelas I	Rp23.000.000.000	Rp28.733.273.256	
		Pokok Lelang Pegadaian	Rp8.000.000.000	Rp19.212.815.300	
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2023)	Rp160.650.135	Rp211.704.729	131,78%
3	Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna LayananKPKNL	4,60	4,65	4,65%



Internal Process Perspective					
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK			85,09%
		a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2022)			83,01%
		b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2021			91,33%
		Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	34	76	223,53%
		Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	3	8	266,67%
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)			121,14%
		1.Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN	50	64	
		2.Target/Realisasi Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi	98	112	
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0%	0%
6	Pelaksanaan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction			100%
		Jumlah Realisasi Frekuensi e-Auction			304
		Jumlah Realisasi Frekuensi e-Conventional Auction			-
		Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang			304
7	Pengawasan Pengendalian yang Efektif	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara			100%
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode Semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L			12
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L			16
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021			12
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022			16



Learning & Growth Perspective					
9	SDM yang Kompeten	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM	75	93,32	93,32
		Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80	96,96	124,43
		Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	95,10	121,20%
11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	99,09%	105,66%
		Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	103,76%	103,76%





Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2019 s.d. 2023

Indikator Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022	2023
Presentase Hasil Pokok Lelang	86,50%	160,23%	97,45%	154,66%	217,32%
Presentase Implementasi e-Auction	111,11%	111,11%	108,70%	108,70%	100,00%
Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	104,64%	104,98%	103,87%	103,76%	93,29%

Catatan:

Indikator Utama yang dibandingkan hanyalah indikator utama yang terdapat pada setiap tahunnya agar dapat dilakukan perbandingan.





3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU KPKNL Lahat Tahun 2023 hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DJKN Tahun 2023 sebagai berikut:

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila dapat mewujudkan APBN yang efektif dan efisien. Upaya untuk mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 3 (dua) IKU yaitu:

- Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
- Persentase Produktivitas Lelang
- Indeks Integritas

Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, adalah Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara yang bersumber dari barang milik negara dan hasil pengurusan piutang negara serta Penerimaan Hasil lelang direpresentasikan oleh PNBP dari lelang. Jumlah Penerimaan Negara yang dicapai oleh KPKNL Lahat pada tahun 2023 adalah sebesar Rp Rp Rp5.761.272.248 dari target yang ditetapkan sebesar Rp Rp4.420.700.000 atau dalam persentase sebesar 130,32% dari target 100%.

IKU untuk Persentase Produktivitas Lelang terdiri atas penggabungan target persentase jumlah frekuensi lelang yaitu seberapa banyak pelaksanaan lelang selama tahun 2023 serta target jumlah frekuensi lelang yang laku dan Jumlah Realisasi Lot Laku Lelang. Target Nilai Produktivitas lelang pada tahun 2023 adalah sebesar 80% dengan realisasi sebesar 105%, dengan capaian akhirnya sebesar 131,25%.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Indeks integritas yang dicapai oleh KPKNL Lahat pada tahun 2023 adalah sebesar 89,17 dari target yang ditetapkan sebesar 88,67 atau dalam persentase sebesar 100,56% dari target 100%.

Sasaran Strategis I

Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian



Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa ialah pelayanan terkait pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang diselesaikan dengan tepat waktu dan menghasilkan output yang diinginkan oleh stakeholder maupun pihak internal. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang dan Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2023).

- [Persentase realisasi pokok lelang](#)

Pelaksanaan lelang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan didahului dengan adanya pengumuman lelang dapat menghasilkan lelang yang kompetitif dan hasilnya maksimal. Hasil lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari adanya peminat lelang dan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/limit lelang. Dari pelaksanaan lelang tersebut dipungut bea lelang pembeli dan penjual yang masing-masing kategori lelang memiliki besaran persentase bea lelang sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU guna mencapai sasaran strategis dimaksud yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang.

Sasaran Strategis II

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa



Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Pokok Lelang adalah harga lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurang Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II dalam periode tertentu.

Jumlah pokok lelang yang dicapai oleh KPKNL Lahat pada tahun 2023 adalah sebesar Rp Rp77.148.173.366 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 35.500.000.000 atau dalam persentase sebesar 217,32% dari target 100%.

Capaian Pokok Lelang KPKNL Lahat Tahun 2019-2023



- [Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara \(Saldo PNDS s.d. 2023\)](#).

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai) Adapun target IKU ini sebesar 100%



Sasaran Strategis III

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNB (revenue generating).
- 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.
- 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum
- 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal

Untuk mewujudkan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif, KPKLN Lahat mengidentifikasi 4 (empat) IKU antara lain:

- **Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020. Adapun realisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2023 sebesar 86,19% dari target sebesar 65%.

- **Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan**

Target persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan pada tahun 2023 sebesar 405 (100%) dan telah terealisasi sebesar 455 (112,35%) dari target. Upaya ini untuk mendukung pelaksanaan Program Pemerintah terkait sertifikasi tanah BMN sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.



- **Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN**

Berkas Kasus Pengurusan Piutang Negara (BKPN) merupakan berkas yang berisi dokumen bukti tahapan pengurusan Piutang Negara dan diberi nomor/kode register BKPN sesuai dengan tahun penyerahan Piutang Negara kepada PUPN/DJKN. Jumlah BKPN yang dapat diselesaikan merupakan jumlah BKPN yang dihentikan/selesai tahapan pengurusan piutangnya dikarenakan BKPN tersebut lunas, BKPN ditarik oleh penyerah piutang untuk dilakukan restrukturisasi, BKPN ditetapkan sebagai Piutang Negara Belum Dapat Diselesaikan (PSBDT) atau BKPN dikembalikan kepada penyerah piutang.

Jumlah BKPN yang dapat diselesaikan (lunas, penarikan, PSBDT, pengembalian) oleh KPKNL Lahat pada tahun 2023 adalah sebanyak 6 debitur dari target 5 debitur.

-



Sasaran Strategis IV

Pelaksanaan Penilaian Yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penyelesaian Tugas di Bidang Penilaian adalah penyelesaian tugas bagi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah berupa melaksanakan kegiatan di bidang properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan MenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2021 yang selanjutnya dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.06/2021.

Tugas di Bidang Penilaian bagi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah meliputi butir-butir kegiatan baik yang termasuk dalam unsur utama (Pelatihan, penilaian di bidang properti/bisnis, pengembangan profesi), maupun unsur penunjang, dengan batasan setiap unsurnya adalah minimal unsur utama 80% AKK dari yang ditarget dan maksimal 20% AKK dari yang ditargetkan.

Butir-butir kegiatan dimaksud mempunyai nilai angka kredit yang harus dikumpulkan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan tata kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang efektif, KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu:

- **Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan). Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 0% Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Adapun realiasi deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2023 sebesar 0% dari target tahun 2023 sebesar 15%.

- **Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam, kecuali permohonan penilaian yang memerlukan bantuan tenaga penilai dari unit lain. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilai selesai dan disampaikan ke pemohon.

Adapun realiasi Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien pada tahun 2023 sebesar 97 (138,69%) dari target tahun 2023 sebesar 70 (100%).



Sasaran Strategis V

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu:

- **Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction**

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi:

1. Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
2. E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

Untuk IKU Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction memiliki target 100% di tahun 2023 dan telah tercapai sebesar 100%.

- **Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Tujuan IKU ini ialah terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Persentase objek BMN yang telah dievaluasi pada tahun 2023 sebanyak 74 NUP atau 145,10% dari target sebanyak 51 NUP.



Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dilakukan untuk mengidentifikasi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat digunakan sebagai saran/rekomendasi/bahan perbaikan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Untuk mencapai sasaran strategis ini,

Sasaran Strategis VI

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

Pengawasan dan Pengendalian Keayaan Negara yang Efektif

- Terselesainya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti
- Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara.

- Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara**
Target persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tahun 2023 adalah 86%, realisasi selama tahun 2023 adalah 94,59% atau 109,99% dari target yang telah ditetapkan.





Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan memwadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Sasaran Strategis VII

Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif

Informasi Publik adalah Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu ketepatan penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi Publik dihitung sejak permintaan informasi publik diterima oleh PPID Tingkat I. Dalam hal permohonan ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan dan informasi yang diminta terkait PPID Tingkat I, maka PPID Kemenkeu wajib menyampaikan permohonan tersebut kepada PPID Tingkat I paling lambat 2 hari kerja setelah permintaan informasi dinyatakan lengkap melalui nota dinas dan/atau email, selanjutnya PPID Tingkat I wajib menyampaikan informasi kepada PPID Kementerian Keuangan melalui nota dinas dan/atau email paling lambat 13 hari kerja sejak diterimanya nota dinas dan/atau email permohonan dari PPID Kemenkeu. Pemohon dapat menyampaikan permintaan informasi melalui email, surat, telepon, dan aplikasi e-ppid.

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) berhasil mencapai nilai 117,5 (146,8%) dari target sebesar 80 (100%)



Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sasaran strategis ini dapat diukur tingkat daya serap Belanja Barang, dan Belanja Modal terhadap pagu Belanja Barang dan Belanja Modal serta optimalisasi penyerapan anggaran.

Sasaran
Strategis VIII

Penguatan
Pengelolaan
Keuangan
dan BMN
yang Optimal

Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 2 (dua) yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan.

- **Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.**

Implementasi kualitas pelaksanaan anggaran dapat diukur dari 4 (empat) komponen yaitu:

1. Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-KL dan DIPA, tidak termasuk *softblocking*, hasil efisiensi, dana lainnya yang penggunaannya bersifat khusus (kontijensi).
2. Keluaran riil adalah barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
3. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal, meliputi objek: perjalanan dinas, rapat dalam kantor, konsinyering/paket *meeting*, kudapan/makan siang rapat, langganan daya dan jasa, honorarium tim, honorarium, narasumber, moderator, kepanitiaan lainnya, kecuali untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai yang diselenggarakan oleh BPPK, proses pengadaan barang/jasa, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja barang operasional/non operasional lainnya. Hasil lebih atau sisa dana dihitung sebagai efisiensi apabila capaian keluaran riil paling sedikit seratus persen (100%).
4. Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan belanja modal dengan rencana penarikan dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai: lembar ketiga DIPA atau RPD revisi pertama, atau RPD revisi pertama setelah APBN-P, atau RPD revisi pertama setelah penetapan kebijakan *selfblocking*.

Capaian kinerja diperhitungkan sesuai dengan ketentuan SE-35/MK.1/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 93,29%. Secara rinci dapat digambarkan sesuai tabel berikut:

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
IKU INDEKS KINERJA KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIT ...
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A) Nilai IKPA (Bobot 50%)			92.12
1. Revisi DIPA	100.00	10	10.00
2. Deviasi Hal III DIPA	93.62	10	9.36
3. Penyerapan Anggaran	81.42	20	16.28
4. Belanja Kontraktual	100.00	10	10.00
5. Penyelesaian Tagihan	66.67	10	6.67
6. Pengelolaan UP dan TUP	98.11	10	9.81
7. Dispensasi SPM	100.00	5	5.00
8. Capaian Output	100.00	25	25.00
B) Nilai SMART (Bobot 50%)			88.48
1. Capaian Output	100.00	43.50%	43.50
2. Efisiensi	60.95	28.60%	17.43
3. Konsistensi RPD	99.74	18.20%	18.15
4. Penyerapan Anggaran	96.88	9.70%	9.40
Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan IV			90.30
Realisasi IKU IKKPA Triwulan IV			93.29

Antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan pengeluaran riil tiap bulannya seringkali tidak sesuai sehingga berdampak pada capaian akhir dari target kualitas pelaksanaan anggaran.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk pencapaian target IKU ini antara lain membuat prognosa rencana kerja tiap-tiap seksi dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk mencapai kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Realisasi Anggaran, sehingga berdampak pada capaian akhir dari target kualitas pelaksanaan anggaran menjadi baik.

- **Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan**

Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan berfokus pada dukungan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) merupakan Indeks yang diukur oleh LKPP yang terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan. Dalam mendukung capaian ITKP dengan target minimal baik di tahun 2023 maka diperlukan indikator dukungan ITKP yakni Persentase Dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan. Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

- a. SiRUP Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target
- b. e-Tendering Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP
- c. e-Purchasing Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.
- d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.
- e. e-Kontrak Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai.

Adapun realisasi IKU ini di tahun 2023 ialah sebesar 267,00% dari target 100%.



- **Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN**

Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Lelang merupakan salah satu ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

Nilai manfaat ekonomi pada lingkup pejabat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lelang diperoleh dari:

1. Bea lelang Jafung Pelelang;
2. Biaya permohonan lelang Jafung Pelelang;
3. Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi Jafung Pelelang
4. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang Jafung Pelelang

Adapun realisasi deviasi data PNBP fungsional DJKN pada tahun 2023 sebesar 0% dari target sebesar 10%.



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni: 1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi, 2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), 3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA), 4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP), 5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS), 6. Penyusunan Profil Pegawai, 7. Penyusunan Simpulan dan LPPI, 8. Jumlah Pengaduan Masyarakat, 9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI 10. Kepuasan Stakeholders, dan 11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Adapun realisasi Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif pada tahun 2023 sebesar 95,78 (159,63%) dari target sebesar 60 (100%).

Sasaran Strategis IX

Penguatan Pengawasan- Pengendalian Internal yang Efektif



Dengan adanya SDM yang memiliki kompetensi yang tinggi diharapkan Pengelolaan Kekayaan Negara, pengurusan Piutang Negara dan pelayanan lelang dapat dilakukan secara profesional. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Lahat mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu **Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**.

Sasaran Strategis X

Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Sasaran strategi SDM yang kompetitif dengan indikator kinerja utama dengan IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan target tahun 2023 sebesar 100% dari keseluruhan jumlah pegawai dapat tercapai dengan hasil capaian sebesar 120% atau telah mencapai 120% dari target.

Pengembangan kompetensi pegawai diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan kompetensinya di bidangnya masing-masing. Pendidikan dan pelatihan maupun diklat, *workshop*, seminar, sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPPK, internal DJKN, maupun internal satker.





- Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut." Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

A. Pengelolaan Kinerja Organisasi (Bobot 50%)

B. Pengelolaan Kinerja Pegawai (Bobot 50%)

Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 senilai 80 dapat terpenuhi dengan capaian senilai 91,19 atau 113,99%.



B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Lahat Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-015.09.2.506126/2022 Tanggal 22 Novemebr 2022. adalah sebesar Rp4,089,438,000 yang kemudian direvisi pada tanggal 14 Oktober 2023 dengan realisasi sebesar Rp 3,961,700,416 atau dengan persentase realisasi atas anggaran sebesar 96,88%.

Adapun realisasi anggaran 2023 tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal

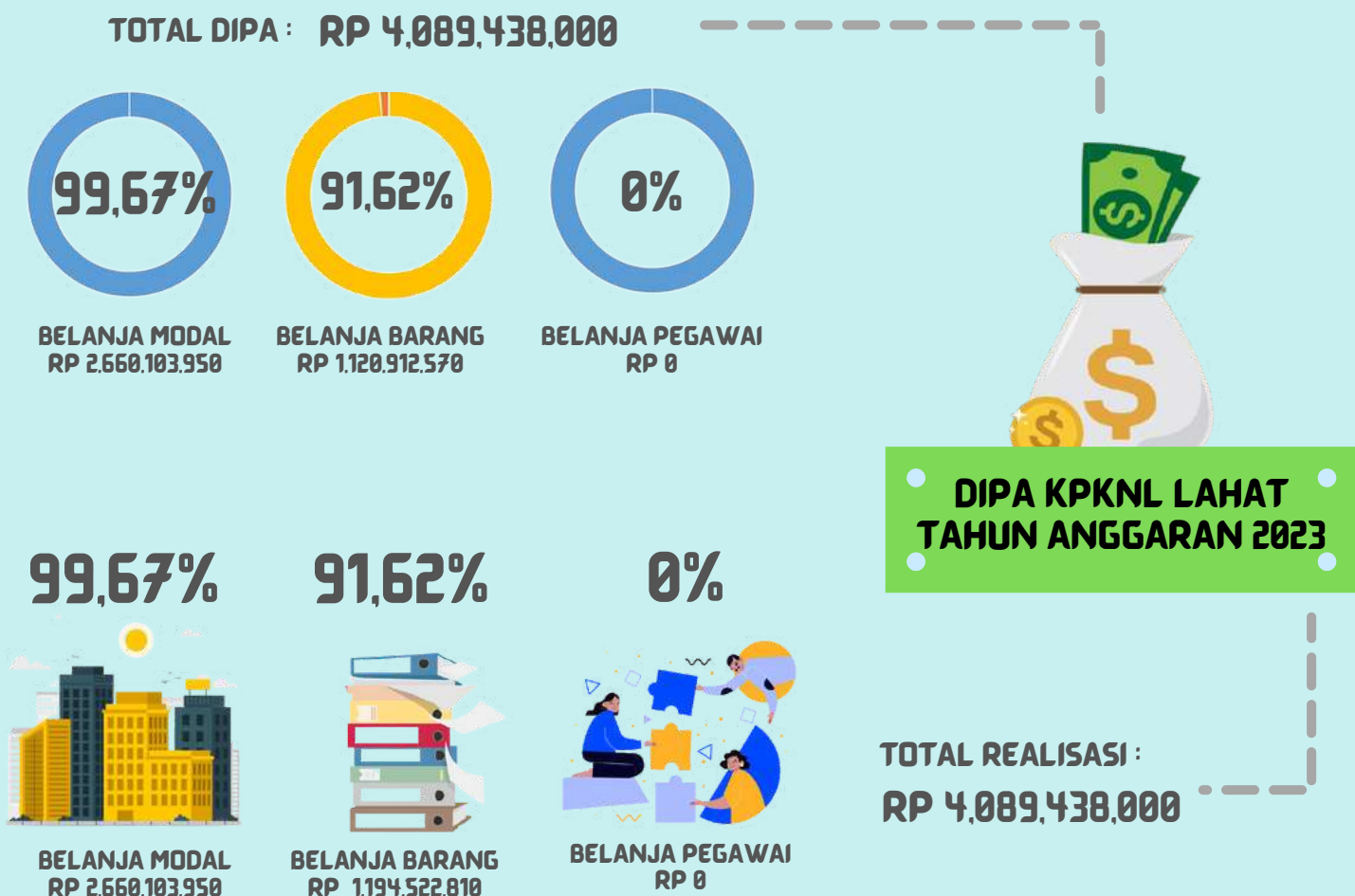
Dana yang dianggarkan untuk belanja modal pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.668.786.000,00 dengan realisasi sebesar 2.660.103.950,00 (99,67%)

2. Belanja Barang

Dana yang dianggarkan untuk belanja barang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.420.652.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.301.596.466,00 atau sebesar 91,62%.

3. Belanja Pegawai

Dana yang dianggarkan untuk belanja pegawai pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 0,00 dengan realisasi sebesar 100%.



Selama tahun 2023 KPKNL Lahat telah mendapatkan beberapa penghargaan (*achievement*) antara lain sebagai berikut:

- KPKNL Paling Tertib dalam Pengadministrasian Minuta Risalah Lelang dan Penyampaian Laporan
- KPKNL dengan NKO terbaik di wilayah Kanwil DJKN SJB.

**C.
DATA DAN
NARASI
KINERJA
LAINNYA**

Piagam dan sertifikat di atas menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari LAKIN KPKNL Lahat Tahun Anggaran 2023.



PENUTUP



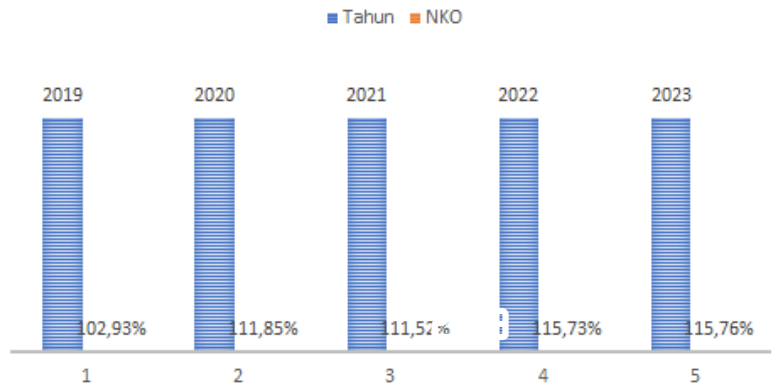
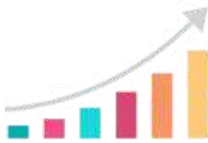
BAB 4



A. SIMPULAN

Secara umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2023 dengan sangat baik. Seluruh target atas 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan total 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three*. KPKNL Lahat Tahun 2023 dapat tercapai dengan sempurna. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 111,52% dari nilai maksimal 120%.

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) KPKNL LAHAT 2019 - 2023



Sebuah prestasi yang layak dipertahankan mengingat NKO pada tahun anggaran 2023 merupakan NKO tertinggi jika dibandingkan NKO pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan konsistensi KPKNL Lahat dalam peningkatan kinerja dan dalam melakukan berbagai perbaikan menuju kesempurnaan.

Sementara itu, total capaian serapan anggaran sampai dengan Tahun 2023 adalah Rp 3,961,700,416 dari anggaran sebesar Rp Rp 4,089,438,0000 atau terealisasi sebesar 96,88%.



ANGGARAN & REALISASI KPKNL LAHAT TAHUN 2023

96,88%



KENDALA

Dalam perjalanannya, KPKNL Lahat menemukan beberapa kesulitan dan kendala ketika melaksanakan tugas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Lahat, pegawai KPKNL Lahat di tahun 2023 berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dimana 2 (dua) pegawai berstatus tugas belajar dengan sebaran wilayah kerja 8 (delapan) kabupaten/kota.
2. Masih rendahnya minat masyarakat dengan proses jual beli secara lelang yang mengakibatkan jumlah barang yang laku di wilayah KPKNL Lahat masih rendah, terutama untuk lelang eksekusi hak tanggungan.
3. Banyaknya lelang yang diestimasikan akan laku menjadi batal karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur.
4. Kultur budaya dimana biasanya orang enggan membeli barang lelang dikarenakan masih terikat hubungan kekerabatan, terutama pada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan serta adanya anggapan bahwa barang lelang adalah barang bermasalah.
5. Masih rendahnya tingkat pemahaman satuan kerja terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang juga disebabkan oleh banyaknya peraturan/ketentuan yang baru menyebabkan masih adanya perbedaan pemahaman dari stakeholder dalam menafsirkan peraturan terkait tugas dan fungsi KPKNL;
6. Cukup banyak satuan kerja dari *stakeholder* yang belum mampu memberdayakan secara maksimal teknologi informasi;
7. Penyampaian dokumen oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
8. Wilayah kerja KPKNL Lahat yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas;

B. SARAN

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Lahat adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Lahat agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pemenuhan target capaian, saat ini KPKNL Lahat lebih fokus untuk menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru.

Adapun saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja KPKNL Lahat adalah dengan menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerja sama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima dan profesional kepada *stakeholder* dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Meningkatkan penggalan potensi lelang, utamanya lelang Barang Milik Daerah (BMD)
6. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
9. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegoatan yang bersifat lintas unit;
10. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
11. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi Kekayaan Negara dan sertifikasi BMN.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat Tahun Anggaran 2023 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. Kami berharap LAKIN ini dapat memberikan informasi secara transparan dan menyeluruh kepada seluruh pihak terkait tugas dan fungsi KPKNL Lahat.

Selanjutnya, LAKIN ini semoga dapat digunakan untuk merespon setiap perkembangan tuntutan *stakeholder* serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

Lahat, 31 Januari 2024
Kepala Kantor

MASDJAYA



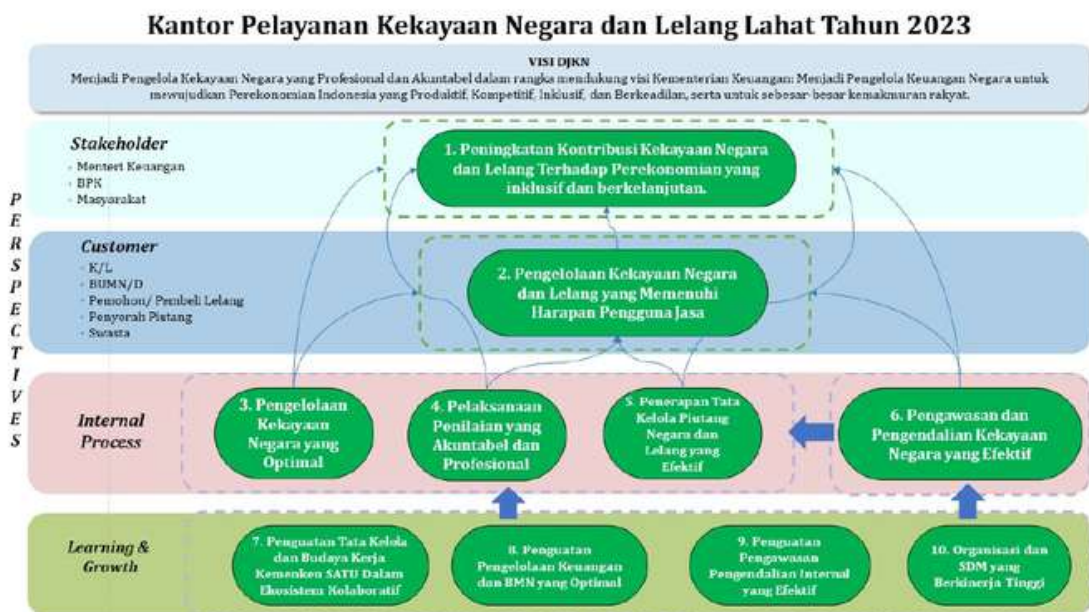
LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3/WKN.04/2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG LAHAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
LAHAT
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction	94%
		5b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
		6b-CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 Skala 4)
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		8b-CP Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
9	Penguatan Pengawasan-	9a-CP Indeks Integritas	88,67



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
LAHAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
5b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
6b-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)	-	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%
8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
9a-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
9b-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
10a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10b-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Lahat,



Utandatanganinya Secara Elektronik
Masdjaya



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Pengendalian Internal yang Efektif	9b-CP Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	10a-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
		10b-CP Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80

Program/ Kegiatan Tahun 2023	Anggaran
Program Pengelolaan Perbendaharaan , Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 264,933,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 6,469,000
2. Pengelolaan Aset	Rp 258,464,000
Program Dukungan Manajemen	Rp 3,824,505,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 15,949,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3,798,332,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 2,556,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 7,668,000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung



Ditandatangani Secara Elektronik
Surya Hadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat



Ditandatangani Secara Elektronik
Masdjaya



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat



Ditandatangani Secara Elektronik
Masdjaya



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Masdjaya, S.E., M.Ec.Dev.	NAMA	Surya Hadi	
NIP	197601231998031001	NIP	196304211992031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	
NO (1)	RENCANA HASIL KERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)	PERSPEKTIF (5)
A. UTAMA				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan



	Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)				
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan	
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan	
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis	
6.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	Proses Bisnis	
7.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Proses Bisnis	
8.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntutabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	Proses Bisnis	



	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)				
9.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis	
10.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction	94%	Proses Bisnis	
11.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis	
12.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis	
13.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis	



14.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Penguasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3.55 skala 4)	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penguasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penguasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penguasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Integritas	88,67	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penguasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran



19.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	<p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik instansi dan negara.
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama



PERILAKU KERJA	
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Masdjaya

197601231998031001

Ditandatangani secara elektronik

Surya Hadi

196304211992031002



NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
PERIODE S. D. DESEMBER 2023
TAHUN 2023

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi 2023	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
Stakeholder Perspective(30%)									
								34,06%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							113,52%	
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	130,32%	14%	33%	130,32%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	161,44%	14%	33%	201,80%	120,00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88,67	89,17	14%	33%	100,56%	100,56%	hijau
Customer Perspective(20%)									
								23,71%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							118,57%	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	217,32%	14%	50%	217,32%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	117,14%	14%	50%	117,14%	117,14%	hijau
Internal Process Perspective (25%)									
								28,98%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							117,20%	
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	68%	86,19%	19%	37%	126,75%	120,00%	hijau
3b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	112,35%	19%	37%	112,35%	112,35%	hijau
3c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	120,00%	14%	27%	120,00%	120,00%	hijau
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
4a-CP	Deviasi ketegunaan hasil penilaian	P/M	25%	0,00%	14%	40%	200,00%	120,00%	hijau
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	E/M	70	97	21%	60%	138,69%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							112,37%	
5a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	94%	100,00%	14%	56%	106,38%	106,38%	hijau
5b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	123,01%	11%	44%	123,01%	120,00%	hijau
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							109,99%	
6a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	86,00%	94,59%	14%	100%	109,99%	109,99%	hijau
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							120,00%	
7a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80	117,50	14%	100%	146,88%	120,00%	hijau
Learning & Growth Perspective (25%)									
								29,01%	
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							111,10%	
8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100,0%	93,29%	14%	33%	93,29%	93,29%	kuning
8b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	267,00%	14%	33%	267,00%	120,00%	hijau
8c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	15%	0,00%	14%	33%	200,00%	120,00%	hijau
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120,00%	
9a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60	95,78	14%	100%	159,63%	120,00%	hijau
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							116,99%	
10a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
10b-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80,00	91,19	14%	50%	113,99%	113,99%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)									
								115,76%	hijau

Mengetahui,
Kepala KPKNL Lahat

Kepala Seksi Kepatuhan Internal
Selaku Administrator Kinerja Organisasi



Ditandatangani secara elektronik
Masdjaya
NIP. 19760123 199803 1 001



Ditandatangani secara elektronik
Januardo S
NIP. 198601132007011004





PIAGAM PENGHARGAAN

KANTOR WILAYAH DJKN
SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA

KPKNL LAHHAT

Atas Prestasi Yang Telah Diraih Sebagai
**KPKNL PALING TERTIB DALAM PENGADMINISTRASIAN
MINUTA RISALAH LELANG DAN PENYAMPAIAN LAPORAN**

Palembang, 7 Desember 2023
Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan,
Jambi, dan Bangka Belitung

FERDINAN LENGKONG



PIAGAM PENGHARGAAN

**Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan,
Jambi dan Bangka Belitung**
memberikan penghargaan kepada

KPKNL LAHAT

atas prestasi yang telah diraih sebagai peraih predikat

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tertinggi Tahun 2023

lingkup Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Palembang, 22 Januari 2024
Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi,
dan Bangka Belitung



Ditandatangani secara elektronik

Ferdinan Lengkong





